**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial**
2. **Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Sasaran kesejahteraan keluarga berfokus pada peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dan yang masuk dalam katagori keluarga miskin, keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I dalam hal ini kesejahteraan keluarga merupakan kajian bidang ilmu Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan di bidang sosial yang fokus kepada masyarakat dan masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Definisi Kesejahteraan Sosial menurut Suharto (2009 : 1) sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial yang sejahtera adalah pada saat tiap-tiap individu merasakan situasi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara fisik, psikis, dan sosial untuk dapat melakukan perannya dalam masyarakat sesuai dengan tugas perkembangannya. Tujuannya untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam kehidupan yang sejahtera dalam kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan juga relasi-relasi sosial maupun lingkungannya.

Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat. Kesejahteraan atau yang biasa disebut kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas yang terorganisir yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standar dan norma-norma masyarakat sebagai tujuan merupakan cita-cita, pedoman dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual. Definisi mengenai Kesejahteraan Sosial menurut Friedlander (2012:9) dikutip dalam Fahrudin adalah sebagai berikut :

Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.)

Definisi kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu pelayanan sosial dan institusi untuk membantu setiap individu, kelompok dan masyarakat untuk mencapai standar hidup yang memadai dan untuk mengembangkan suatu kemampuan serta kesejahteraan yang dimiliki baik oleh dirinya sendiri sehingga dapat melaksanakan peranan sosialnya yang dibutuhkan baik keluarganya ataupun dalam masyarakat agar kebutuhannya terpenuhi secara secara selaras.

1. **Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam UU No 11 tahun 2009 pasal 3 dinyatakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan.

Tujuan kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012: 10), yaitu: “Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya daengan masyarakat di lingkungannya”.

Menurut Schneiderman yang dikutip oleh Fahrudin (2012: 10) mengemukakan bahwa ada tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercemin dalam semua program kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan definisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang maupun kelompok. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial tersebut meilputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi anggota terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kesempatan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan.

1. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegitan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu yang meliputi: mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masayrakat yang mempelihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok kerja dan kelompok lain dalam masyarakat.

1. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

Merujuk dari uraian di atas maka tujuan kesejahteraan sosial merupakan pelakasanaan pada program-program kesejahteraan sosial, misalnya program-program pengembangan masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak yang semuanya bertujuan untuk mencapai sasaran pemeliharaan, kontrol dan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan untuk membantu individu, kelompok, masyarakat dalam mencapai keadaan yang baik secara fisik, mental dan sosial agar terpenuhinya standar kehidupan pokok yang dibutuhkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

1. **Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat agar terhindar dari masalah sosial baru. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012: 12) sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan *(Preventive)*

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

1. Fungsi Penyembuhan *(Curative)*

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

1. Fungsi Pengembangan *(Development)*

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

1. Fungsi Penunjang *(Support)*

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Merujuk dari uraian di atas mengenai fungsi-fungsi kesejahteraan sosial ada empat fungsi yaitu fungsi pencegahan dimana dalam fungsi itu seorang individu, keluarga dan masyarakat akan diberikan dukungan agar terhindar dari masalah-masalah yang baru. Fungsi penyembuhan dimana ada seseorang yang terkena masalah baik secara fisik maupun non fisik akan ada proses penyembuhannya yaitu dengan cara pemulihan agar seseorang tersebut kembali secara baik keberfungsian sosialnya. Fungsi pengembangan dimana fungsi ini memberikan sumbangan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan baik dalam proses tatanan dan sumber sosial yang ada dalam masyarakat. Fungsi penunjang dimana dalam fungsi ini akan mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan suatu program untuk membantunya mencapai suatu tujuan yang di inginkan baik dalam bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, pertanian dan bidang lainnya agar terpenuhi kesejahteraan sosialnya dan terpenuhinya pelayanan sosial lainnya.

1. **Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial**
2. **Pengertian Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial merupakan suatu perbuatan yang baik untuk orang lain atau suatu tindakan-tindakan untuk kita dapat membantu orang lain dalam kesusahan. Dapat di contohkan dalam bentuk misalnya memberi sumbangan kepada orang yang terkena musibah korban bencana alam, memberikan pertolongan kepada orang sakit, memberikan uang kepada anak jalanan, pengemis dan kegiatan-kegiatan amal lainnya. Seperti itu sudah dikatakan pekerjaan sosial tetapi itu disebut pekerjaan sosial amal atau awam. pekerjaan sosial amal atau awam berbeda dengan halnya kita yaitu sebagai pekerjaan sosial profesi.

Pekerjaan sosial sebagai proses pertolongan dimana manusia itu bersifat dinamis, artinya pekerjaan sosial itu relative dalam segi yaitu baik waktu, tempat ataupun situasi-situasi maupun suatu sudut pandang yang mana dapat mengalami perubahan sesuai dengan sudung perkembangan dalam masyarakat. Definisi pekerjaan sosial menurut studi kurikulum yang disponsori oleh the *Counsil cil on Sosial Work Foundation* ( Fahrudin,2012:59) yaitu :

Pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, secara sendiri-sendiri atau dengan kelompok dengan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada hubungan-hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan ini dapat dikelompokan menjadi tiga fungsi: pemulihan kemampuan yang terganggu, penyedian sumber-sumber individu dan sosial, dan pencegahan disfungsi sosial.

Definisi pekerjaan sosial di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu usaha yang dapat meningkatkan keberlangsungan hidupnya dalam keberfungsian sosialnya baik secara individu maupun secara berkelompok dengan kegiatan tersebut. Dan dapat memusatkan suatu hubungan sosial dalam membagun sebuah interaksi yang satu dengan yang lain dalam lingkungan sosialnya. Dalam pekerjaan sosial pada dasarnya dapat membantu individu maupun kelompok yang mengalami suatu masalah baik dalam hal melakukan tugasnya yaitu dimana tugas seseorang dalam kehidupan maupun berfungsi secara sosial.

Pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang didalamnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat akademik atau teori-teori dan ilmu pengetahuan. Dalam pekerja sosial harus berfungsi secara sosial baik dalam menjalankan suatu tujuan agar lebih baik dan berjalan lancar. Definisi pekerjaan sosial menurut Suharto (2007;1), yang dikutip dari Charles H. Zastrow 1999, sebagai berikut :

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Pekerjaan sosial jika merujuk pada pengertian diatas kita melihat bahwa pekerjaan sosial memberikan proses pertolongan baik untuk individu, kelompok maupun masyarakat luas berdasarkan kerangka pengetahuan. Dalam praktik pekerjaan sosial ini seperti profesi lain yang memiliki fokus utama dalam praktiknya, pekerjaan sosial pun memiliki fokus utama. Dokter menangani pasien begitu pula dalam pekerjaan sosial yang menangani klien. Penanganan klien dalam profesi pekerjaan sosial dilaksanakan melalui pelayanan-pelayanan sosial yang diberikan untuk individu, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkan.

1. **Pekerjaan Sosial Sebagai Suatu Profesi**

Menurut Hornby (1995: 924) yang dikutip dalam Fahrudin (2012 : 63) *profesion* adalah: *“ a paid occupation, especially one that requires advanced education and training.”* (Profesi adalah pekerjaan yang dibayar, khususnya yang memerlukan pendidikan dan pelatihan lanjut). Sedangkan menurut *Webber’s New Universal Unabridged Dictionary* (1983) yang dikutip dalam (Fahrudin 2012 : 63)*, profession* adalah: *“a vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science, and usually involving mental rather than manual work.”*Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pelatihan lanjut dalam suatu bidang pengetahuan budaya atau sains, dan biasanya yang melibatkan kerja mental ketimbang kerja tangan. Adapun menurut Greenwood (1957), ia mengemukakan tentang atribut suatu profesi. Kriteria profesi yang dikemukakan oleh Greenwood yang dikutip dalam Fahrudin (2012 : 64) tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Suatu profesi memiliki pengetahuan dasar dan mengembangkan sekumpulan teori yang sistematik yang mengarahkan keterampilan-keterampilan praktik persiapan pendidikan haruslah bersifat intelektual maupun partikal.
2. Kewenangan dan kredibilitas dalam hubungan klien dengan tenaga professional didasarkan atas penggunaan pertimbangan dan kompetensi professional.
3. Suatu profesi diberi kekuatan untuk mengatur dan mengontrol keanggotaan, praktik professional, pendidikan, dan standar knerjanya sendiri. Masyarakat membenarkan kekuatan-kekuatan pengaturan dan hak-hak istimewa professional.
4. Suatu profesi mempunyai kode etik pengaturan yang mengikat, yang dapat ditegakkan, eksplisit, dan sistemik yang memaksa perilaku etik oleh anggota-anggotanya.
5. Suatu profesi dibimbing oleh budaya nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol dalam suatu jaringan organisasi dari kelompok-kelompok formal dan informal, sebagai saluran untuk profesi itu berfungsi dan melaksanakan pelayanan-pelayanannya.

Kriteria tersebut menunjukan keberadaan profesi pekerjaan sosial di Indonesia sekarang ini dapat dinilai apakah sudah bisa di sebut layak dan merupakan profesi atau belum. Dalam dunia Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial konsep relawan dan pekerja sosial memang bukan merupakan istilah yang baru.Di Indonesia saat ini, konsep relawan sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bergelut di bidang pekerjaan sosial yang bukan berasal dari pendidikan Pekerjaan Sosial ataupun Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Konsep pekerja sosial digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bergelut di bidang pekerjaan sosial yang berasal dari pendidikan Pekerjaan Sosial ataupun Ilmu Kesejahteraan Sosial. Agar lebih jelas mengenai definisi pekerja sosial, relawan sosial, ataupun tenaga yang bergerak di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, berikut peneliti paparkan definisi tersebut sesuai dengan, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pada Undang-Undang tersebut pada bab 1 pasal 1 ayat 4 terdapat definisi pekerja sosial sebagai berikut : “Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial ”.

Definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa pekerja sosial adalah suatu profesi yang didapatkan melalui pendidikan yang terkait dengan pekerjaan sosial. Selanjutnya masih di dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang tersebut pada ayat 5 terdapat definisi mengenai relawan sosial, definisi tersebut adalah: “ Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan ”.

Ditinjau dari definisi di atas, menurut peneliti terdapat kesamaan dengan definisi pekerja sosial, hanya saja yang membedakan adalah orang atau kelompok orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan pekerjaan sosial tetapi melaksanakan kegiatan sosial secara sukarela. Untuk melengkapi kedua definisi di atas peneliti mencamtumkan satu lagi seseorang atau kelompok orang yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, dan berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial no 11 tahun 2009 disebut sebagai Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, yang definisinya terdapat pada bab 1 pasal 1 ayat 6, yaitu :

“Pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa baik pekerja sosial professional maupun relawan sosial yang bekerja di bidang Kesejahteraan Sosial disebut sebagai pelaku penyelenggaran kesejahteraan sosial.

1. **Fungsi Dasar Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial adalah suatu satu di antara kegiatan dalam pemberian pelayanan sosial (*social service*). Pelayanan sosial mempunyai bermacam-macam bentuk sesuai dengan fungsi-fungsinya sebagaimana dikemukakan peleh Max siporin (1975) yang dikutif dalam Huraerah (2011: 39-40) adalah:

1. Pelayanan akses *(access service),* mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya mmebantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
2. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi bagi orang-orang usia lanjut (jompo), dan sebagainya.
3. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat [enitipan bayi/anak, KB (Keluarga Berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya.

Merujuk ketiga fungsi di atas kesemuanya merupakan kebutuhan sosial bagi setiap masyarakat, dan secara tersirat bahwa fungsi pekerjaan sosial ini memberikan pelayanan atau informasi bagi setiap masyarakat yang datang ke pekerja sosial atau ke lembaga kesejahteraan sosial.

Pekerjaan sosial memiliki misi dan tujuan yang menunjang fungsi-fungsi pekerjaan sosial di atas, pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian orang dan meningkatkan efektivitas lembaga-lemabaga di dalam masyarakat yang menyediakan sumber-sumber serta kesempatan-kesempatan bagi warganya yang menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah misi pekerjaan sosial yang diterjemahkan menjadi tujuan pekerjaan sosial yang memberikan arah yang lebih jelas. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW yang dikutip dalam Fahrudin (2012:66) yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki kefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial (dalam Zastrow, 2008).

Merujuk pada penjelasan di atas bahwa tujuan praktik pekerja sosial itu akan mengatasi atau memudahkan kita yang terkena masalah dengan adanya praktik pekerja sosial ini kita dapat menceritakan yang kita alami, yang kita takutkan dan dapat memberikan pertolongan bagi masalah yang susah dipecahkan.

1. **Peran Pekerja Sosial**

Ditinjau pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) yang dikutip dalam Suharto (2010: 97-103), adapun beberapa peran pekerjaan sosial dalam pembimbing sosial. Bahwa ada lima peran di bawah ini sangat relevan diketahui oleh para pekerja sosial yang akan melakukan pendampingan sosial diantaranya sebagai berikut :

* 1. Fasilitator merupakan peran fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau trasisional.
  2. Broker merupakan seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien memperoleh keuntungan sebesar mungkin.tugas-tugas pekerja sosial sebagai broker
  3. Mediator merupakan peran ini sangat penting dalam paragdigma generalis, peran mediator sangat diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik anatara berbagai pihak. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator melalui kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai resolusi konflik.
  4. Pembela merupakanperan pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seseorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus.
  5. Pelindung yaitu melakukan peran sebagai pelindung(*guardian role*), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial.

Merujuk pada uraian di atas bahwa peran pekerja sosial merupakan suatu peran yang akan membantu seseorang yang terkena permasalahan. Dalam hal tersebut peran fasilitator itu dapat mendefisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapai tujuannya. Lalu dapat membantu agar mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan seseorang yang terkena masalah, peran fasilitator ini juga dapat membantu memfasilitasi keterkaitan dan kualitas sinergi sebuah sistem, menemukan kesamaan dan perbedaan yang awalnya saling egois akan pendapatnya masing-masing tetapi setelah diberi bantuan masalah tersebut dapat terpecahkan dengan solusi-solusi yang alternative.

Peran selanjutnya yaitu peran broker dimana seorang broker itu harus dapat membantu seorang mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisiten, lalu broker itu harus mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan klien agar masalah tersebut selesai. Selanjutnya peran mediator yaitu dengan cara mediasi lalu kita bisa nencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik atau masalahnya lalu kita dapat memfasilitasi komunikasi dengan cara medukung mereka agar berbicara satu sama lain.

Peran selanjutnya yaitu peran pembela dimana seorang pekerja sosial akan memberikan seorang tersebut kesempatan untuk saling keterbukaan atau membiarkan berbagai pandangan untuk di dengar antara satu dengan yang lainnya dalam hal keadilan. Dan peran terakhir dimana peran ini memberikan perlidungan yang baik akan seseorang tersebut yang terkena masalah akan menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan, dan dapat berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

1. **Metode Intervensi Pekerjaan Sosial**

Metode intervensi sosial dalam ilmu kesejahteraan sosial merupakan suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari individu, kelompok, dan masyarakat. Menurut Rukminto (2013: 161) metode intervensi sosial, sebagai berikut :

* 1. Intervensi Sosial pada individu dan keluarga atau (*Casework*).
  2. Intervensi sosial kelompok atau (*Social Grup Work*).
  3. Intervensi sosial komunitas dan organisasi atau (*Community Organization* *Community Development*).

Metode intervensi sosial komunitas merupakan metode yang diarahkan pada upaya mengubah masyarakat di tingkat yang lebih luas, seperti di tingkat provinsi. Dengan kata lain metode intervensi ini berfokus pada stategi dalam pengembangan masyarakat, seperti pembangunan ekonomi, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan sosial rakyat di suatu negara.

Penjelasan di atas merupakan suatu metode intervensi sosial pada individu pada dasarnya terkait dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosial individu (*individual social functioning*) agar individu dan keluarga tersebut dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas sosial dan individu mereka. Dalam hal ini keluarga menjadi fokus intervensi karena masalah yang dihadapi individu biasanya dipengaruhi oleh anggota keluarga mereka.

Penjelasan tentang metode intervensi sosial pada kelompok merupakan suatu metode yang dilakukan terhadap seseorang dalam suatu kelompok untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya di dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain metode sosial kelompok adalah suatu metode untuk mengembangkan relasi sosial dimana kelompok digunakan sebagai medianya karena kelompok itu memiliki kekuatan terhadap anggotanya itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Penjelasan tentang metode intervensi sosial komunitas merupakan metode yang diarahkan pada upaya mengubah masyarakat di tingkat yang lebih luas jangkuannya, seperti di tingkat provinsi. Dengan kata lain metode intervensi ini berfokus pada stategi dalam pengembangan masyarakat, seperti pembangunan ekonomi, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan sosial rakyat di suatu negara.

1. **Tahap-tahap Intervensi Pekerjaan Sosial**

Pelayanan sosial dalam prosesnya mengacu pada tahap-tahap intervensi pekerjaan sosial melalui proses pertolongan dalam beberapa bagian sistem sosial seperti yang diungkapkan oleh Siporin yang dikutip Iskandar (2013:65), sebagai berikut :

* 1. Tahap *Engagement*, *Intake* dan Kontrak.

Tahap ini adalah tahap permulaan pekerja sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, pelayanan apa yang dapat diberikan oleh pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu memenuhi kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Kontrak adalah kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien yang di dalamnya dirumuskan hakekat permasalahan klien, tujuan-tujuan pertolongan yang hendak dicapai, peranan-peranan dan harapan-harapan pekerja sosial dan klien, metode-metode pertolongan yang akan digunakan serta pengaturan-pengaturan pertolongan lainnya.

* 1. Tahap Assesment

Assesment proses pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor-faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh klien, kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan hal itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien.

* 1. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi

Rencana intervensi merupakan proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien, apa tujuan pemecahan masalah tersebut,

* 1. Tahap Melaksanakan Program Berdasarkan rencana intervensi

Pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan pemecahan masalah klien .Dalam pelaksanaan pemecahan masalah ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif pada setiap kegiatan.

* 1. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini pekerja sosial harus mengevaluasi kembali semua kegiatan pertolongan yang telah dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilannya, kegagalannya atau hambatan-hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh klien, yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.

* 1. Tahap Terminasi

Tahap terminasi dilakukan bilamana tujuan pertolongan telah dicapai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor external yang dihadapi pekerja sosial atau karena klien lebih baik dialihkan ke lembaga-lemabaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten. Pembagian kerja yang jelas akan mempermudah pelaksanaan pelayanan sosial sampai pada tujuan yang diharapkan.

Penjelasan dari enam intervensi pekerjaan sosial di atas merupakan suatu tahapan-tahapan yang harus dipahami oleh kita sebagai pekerja sosial yang akan membantu seseorang yang terkena permasalahan baik secara individu, kelompok maupun komunitas yang membutuhkan pertolongan kita agar permasalahnnya tersebut dapat terpecahkan dan dapat diselasaikan dengan baik antara klien satu dengan klien yang terkena masalah tersebut.

1. **Tinjauan Tentang Pelayanan Sosial**
   * + 1. **Pengertian Pelayanan Sosial**

Kesejahteraan sosial mencakup adanya pelayanan-pelayanan sosial yang terdapat di masyarakat sebagai upaya atau tindakan dalam membantu mengurangi angka kemiskinan dan bahkan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada oleh karena itu terjalin sebuah keberfungsian sosial *(sosial functioning)* baik secara keluarga, masyarakat, individu maupun secara kelompok. Adapun definisi pelayanan sosial menurut Fahrudin (2014:50) yang dikutip dari Romanyshyn 1971, sebagai berikut :

Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu dan keluarga-keluarga melalui (1) sumber-sumber sosial pendukung, dan (2) proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu–individu dan keluarga-keluarga untuk mengatasi stres dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pelayanan sosial merupakan suatu usaha yang harus dipertahankan dalam meningkatkan keberfungsian sosial seseorang secara individu, keluarga melalui sumber pendukung dalam melakukan proses dalam meningkatkan kemampuan bagi individu maupun keluarga dalam mengatasi tuntutan masalah yang dihadapi agar kehidupan sosialnya tetap baik.

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang memberikan bantuan kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang dalam memamfaatkan sumber-sumber yang ada. Sedangkan pelayanan sosial menurut Khan yang dikutip oleh Fahrudin (2012 : 52) yaitu :

Pelayanan sosial dapat ditafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyedian kesehatan, pendidikan, kesejahteraan untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan kelembagaan-kelembagaan pada umumnya dan untuk membantu mereka yang berbeda dalam kesulitan dan kebutuhan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa pelayanan sosial merupakan bantuan dari program-program yang tersedia untuk memberikan suatu pelayanan-pelayanan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan, tetapi dipilih berdasarkan kriteria. Kriteria pemberian pelayanan sosial bukan berdasarkan kriteria pasar yang artinya tidak berdasarkan kriteria kemampuan untuk meningkatkan kemampuan orang dalam menjamin kehidupannya yang sejahtera dalam pemberian pelayanan pada kebutuhan seseorang.

* + - 1. **Pengertian Bantuan Sosial**

Bantuan sosial ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara mengentaskan kemiskinan secara langsung. Bantuan pemerintah melalu Program terpadu P2WKSS yang ditujukan kepada perempuan keluarga yang miskin termasuk dalam jenis bantuan sosial. Berikut Bantuan Sosial menurut Suharto (2011:88) sebagai beriku : Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial *(social security)* yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagian kemanusiaan.

Definisi di atas mengenai bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, dalam kelompok yang kurang beruntung, termasuk orang-orang yang tidak bisa bekerja seperti orang yang cacat, jompo dan lainnya. Tujuan bantuan sosial di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara mengetaskan kemiskinan secara langsung. Bantuan sosial juga memberikan bantuan berupa uang dan barang yang diberikan kepada individu, keluarga dan kelompok dana atau masyarakat yang sifatnya tidak secara menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan yang dibutuhkan adanya makanan sembako, adanya pemberian bersubsidi dari pemerintah berupa sementara, adanya bantuan untuk rumah yang membuntuhkan dan pemberian barang pokok lainnya.

Kelompok rentan ekonomi merupakan suatu sasaran utama dalam kebijakan bantuan sosial, baik termasuk diantaranya kelompok-kelompok dengan keterbatasan fisik dan mental, kelompok yang tinggal di daerah terpencil dan minim infrastruktur, baik para yatim piatu, keluarga dan orang tua yang tinggal sendiri, para pengungsi, serta kelompok pengangguran yan tidak termasuk kedalam asuransi sosial.

Kelompok yang akan meneriman program bantuan sosial yang efektif dan efisien, erat kaitannya dengan kemampuan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan *egibility* (kelayakan) akan penerima bantuan (misalnya batas usia maksimal penerima bantuan serta kondisi kewarganegaraan ), *entilement,* hak yang seharusnya diperoleh penerima (misalnya seorang yang berada dibawah garis standar kebutuhan).

1. **Tinjauan Tentang Penampilan Peranan Sosial**
2. **Pengertian penampilan peranan sosial**

Peranan *(role)* merupakan aspek dinamis dari kedudukan *(status).* Pentingnya peranan adalah untuk mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu. Dengan demikian orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku dirinya dengan perilaku orang lain dalam kelompoknya. Peranan itu diatur oleh norma yang berlaku dimasyarakat dan melekat pada diri seseorang yang berbeda dengan posisi atau tempatnya dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri, perangkat harapan pada diri seseorang yang pada dasarnya merupakan suatu proses dalam beradaptasi sesuai dengan kedudukan sosial tertentu.

Masyarakat mengharapkan agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Keadaan semacam ini disebut sebagai *“prescribed role”* (peranan yang dianjurkan). Tetapi adakalanya orang-orang yang diharapkan ini tidak berperilaku menurut cara-cara yang konsisten dengan harapan-harapan orang lain. Mereka masih bisa dianggap menjalankan peranan-peranan yang diberikan oleh masyarakat walaupun tidak konsisten dengan harapan-harapan si pemberi peran. Keadaan seperti ini disebut sebagai *“enacted role”* (peranan yang dijalankan) yaitu keadaan yang sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

Soekanto menjelaskan dalam buku sosiologi suatu pengantar (2013:212) bahwa “peranan *(role)* merupakan aspek dinamis kedudukan *(status).* Apabila seseorang melaksanakam hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Artinya peranan dan kedudukan seseorang didalam masyarakat tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena saling berkaitan keduanya, tidak ada peranan tanpa kedudukan dan bahkan sebaliknya karena peranan juga mempunyai dan mengatur tingkah laku pola seseorang. Peranan itu sendiri menurut Perlman (Achlis, 1993:23) mengemukakan pengertian Peranan sebagai berikut :

Peranan merupakan bagian yang diharapkan dimainkan di dalam setiap status yang dikenakan atau dicapai. Jadi peranan merupakan interaksi kemanusiaan yang dipengaruhi oleh struktur dan fungsi dalam hubungannya terhadap status dan posisi. Baik status maupun peranan dan sebaliknya.

Definisi tentang peranan di atas merupakan sesuatu hal yang dapat kita perankan untuk memberikan proses pertolongan yang diinginkan. Dalam peranan di atas manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya yang dipengaruhi oleh suatu bagian struktur dan fungsi untuk hubungan yang lebih baik lagi. Di dalam peranan juga status dan posisi seseorang memiliki arti penting yang saling keterkaitan. Adapun menurut Perlman (Achlis, 1993:23-25) mengemukakan empat komponen-komponen dalam peranan sosial yaitu :

* Komponen aktivitas setiap peranan mengandung dan menyaratkan tingkah laku atau aktivitas-aktivitas tertentu yang harus dilakukan oleh seorang individu dalam hubungannya dengan status tertentu.
* Komponen interaksi setiap peranan menyangkut adanya interaksi. Tiada peranan yang dapat dilakukan seorang diri. Setiap peranan menyangkut satu atau lebih orang lain.
* Komponen harapan-harapan sosial *(sosial expectations)* dan norma-norma sosial. Peranan menyangkut adanya harapan-harapan sosial serta norma-norma sosial bagi aktivitas-aktivitas dan interaksi antara dan diantara makhluk manusia.
* Komponen nilai-nilai emosional dan sentiment. Harapan-harapan dan norma-norma sosial, usaha dan balas jasa, aksi dan respons, kewajiban dan imbalannya, semuanya di rangsang dan merangsang emosi.

Definisi di atas menunjukkan bahwa peranan sosial merupakan suatu bagian bagian yang diharapkan dari setiap status orang tersebut dalam peranannya baik secara struktur dan fungsinya. Dalam setiap peranan sosial juga ada komponen aktivitas-aktivitas dan tingkah laku, adanya komponen interaksi dalam peranan sosial yang juga ada interaksi antara satu orang dengan orang lain, adanya komponen harapan-harapan sosial dan norma-norma sosial yang bersangkutan dengan aktivitas dan interaksi antara dua orang atau lebih yang saling berhubungan, dan adanya komponen nilai-nilai emosional dan sentiment dimana suatu nilai emosional dan sentiment juga akan adanya suatu harapan dan norma sosial di dalamnya yang diransang dan merangsang suatu emosi tersebut

1. **Aspek-aspek peranan sosial**

Penampilan atau pelaksanaan peranan yang diharapkan oleh setiap anggota maupun kolektivitas akan membantu mereka dalam mendapatkan fungsi sosial yang baik pandangan tersebut mempunyai beberapa aspek yaitu :

1. Status Sosial

Status sosial bersifat jamak, artinya orang tersebut tinggal atau hidup di masyarakat yang pasti mempunyai suatu sosial lebih dari satu seperti dirumah sebagai anak, dan di sekolah sebagai murid.

1. Intraksional

Setiap peranan yang dilakukan oleh setiap individu memiliki pasangannya baik dengan individu lain atau dengan lingkungannya. Maka setiap status sosial yang dimiliki seorang selalu mempunyai pasangan (beriteraksi dengan pasangan), misalnya orang tua dengan anaknya, anak laki-laki dengan perempuan, murid dengan guru dan sebagainya.

1. Tuntutan dan harapan

Setiap status sosial yang dimiliki oleh seseorang pada dasarnya menurut tingkah laku yang dilaksanakan. Tuntutan tingkah laku sesuai dengan norma atau nilai dimana orang tersebut berada *(expectionrole).*

1. Tingkah laku

Tingkah laku seseorang merupakan harapan dari lingkungan sosialnya yang saling berinteraksi dan membentuk tingkah laku yang dapat diharapkan sesuai dengan status dan nilai-nilai yang ada.

1. Situasional

Setiap pelaksanaan peranan sosial atau tingkah laku seseorang sesuai dengan statusnya, selain dalam konteks situasi sosial. Situasi sosial merupakan kesatuan dasar yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial. Tingkah laku seseorang didalam konteks situasi sosialnya. Jelas sangat berkaitan dengan perasaan dan dengan cara orang memandang situasi sosial itu sendiri, jika orang tersebut mempunyai pandangan dan perasaan yang positf terhadap situasi sosial maka orang tersebut dapat melaksanakan peran yang diharapkan lingkungannya.

1. **Komponen-komponen Peranan Sosial**

Peranan merupakan bagian yang diharapkan dimainkan di dalam setiap status yang dikenakan atau dicapai. Jadi peranan merupakan interaksi kemanusiaan yang dipengaruhi oleh struktur dan fungsi dalam hubungannya terhadap status dan posisi. Menurut Perlman (Achlis, 1993:23-25) mengemukakan empat komponen dalam peranan sosial yaitu :

1. Komponen aktivitas setiap peranan mengandung dan menyaratkan tingkah laku atau aktivitas-aktivitas tertentu yang harus dilakukan oleh seorang individu dalam hubungannya dengan status tertentu.
2. Komponen interaksi setiap peranan menyangkut adanya interaksi. Tiada peranan yang dapat dilakukan seorang diri. Setiap peranan menyangkut satu atau lebih orang lain.
3. Komponen harapan-harapan sosial *(sosial expectations)* dan norma-norma sosial. Peranan menyangkut adanya harapan-harapan sosial serta norma-norma sosial bagi aktivitas-aktivitas dan interaksi antara dan diantara makhluk manusia.
4. Komponen nilai-nilai emosional dan sentiment. Harapan-harapan dan norma-norma sosial, usaha dan balas jasa, aksi dan respons, kewajiban dan imbalannya, semuanya di rangsang dan merangsang emosi.

Merujuk pada uraian di atas bahwa penampilan peranan sosial anggota P2WKSS dapat menggambarkan suatu kehidupan sosial yang pada hakikatnya merupakan tingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat dengan aktivitas yang akan dijalaninya, interaksi dimana dalam kehidupan itu membutuhkan komunikasi antara anggota satu dengan masyarakatnya, harapan-harapan sosial, dalam kehidupan atau berkegiatan pasti akan ada harapan-harapan yang ingin dicapainya baik dalam perekonomian, harapan dalam nilai norma sosial dan interkasi antara mahkluk sosial lainnya. Lalu dalam nilai-nilai emosional dan sentiment yang dapat ditampilkan oleh seseorang menyangkut hubungan saling memberi dan menerima dengan orang-orang sekitar baik dalam aktivitas-aktivitas maupun didalam hubungan-hubungan timbal balik diantara keduanya. Adapun pengertian menurut para ahli lain dari empat komponen sebagai berikut :

1. **Aktivitas Sosial**

Khrisna (2013:1) mengungkapkan bahwa pengertian aktivitas sosial adalah perilaku, aksi atau perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan sosial tertentu.

1. **Interaksi sosial**

Bentuk umum dari penampilan peran sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan dengan proses sosial) oleh karena itu interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Menurut soekanto (2012:54-55) mengemukakan bahwa pengertian interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial.

1. **Harapan-harapan sosial**

Matnuh (2012:1) mengemukakan bahwa harapan sosial adalah keyakinan emosional pada kemungkinan hasil positif yang berhubungan dengan kejadian tingkat ketekunan yaitu percaya bahwa sesuatu itu mungkin terjadi bahkan ketika ada indikasi sebaliknya.

1. **Nilai-nilai Emosional dan sentiment**

Menurut Willis (2011:63) mengemukakan bahwa nilai emosi adalah bagian penting dari hidup manusia untuk menyatakan perasaannya, seperti rasa sedih , rasa gembira, rasa cemas dan sebagainya.

komponen-komponen di atas peneliti menyimpulkan bahwa dari keempat komponen tersebut dapat menunjukkan peran dalam diri anggota P2WKSS mulai dari kegiatan anggota dalam program P2WKSS, adanya proses sosial yang menjadi interaksi sosial yang dapat menghubungkan anggota satu dengan anggota lainnya untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu aktivitas, harapan yang ingin terjadi setelah adanya kegiatan P2WKSS dalam suatu hidup yang sejahtera dan berkualitas dan emosi atau perasaan-perasaan yang akan diekspresikan oleh anggota P2WKSS.

1. **Tinjauan Tentang Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)**
2. **Definisi P2WKSS**

P2WKSS merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membantu perempuan dalam bidang ekonomi untuk mensejahterakan perempuan- perempuan untuk taraf hidup yang lebih layak. Definisi program P2WKSS sebagai berikut :

Program P2WKSS adalah program peningkatan peran perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa dala program P2WKSS merupakan program dari pemerintah untuk masyarakat terutama dalam kegiatan peningkatan pembangunan untuk perempuan agar perempuan bisa mencapai kesejahteraan hidup yang berkualitas dan dengan adanya program tersebut perempuan– perempuan yang rawan sosial terbantu dalam kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang dan dalam pencapain hidup yang berkualitas.

Pada Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang dimaksud dengan:

* 1. **Program Terpadu P2WKSS** adalah program peningkatan peran perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara terkoordinasi, dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.
  2. **Revitalisasi P2WKSS** adalah upaya untuk mengaktifkan kembali program terpadu P2WKSS dalam rangka menurunkan jumlah keluarga miskin melalui kegiatan terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
  3. **Keluarga Sejahtera** adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubngan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
  4. **Keluarga Pra Sejahtera** yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, pangan dan kesehatan.
  5. **Keluarga Sejahtera Tahap I** yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar serta kebutuhan sosial psikologis seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
  6. ***Human Development Indeks*/Indeks Pembangunan Manusia** adalah pencapaian pembangunan manusia secara kuantitatif yang diukur dengan tingkat pencapaian suatu wilayah dalam tiga dimensi pembangunan manusia yang paling penting, yaitu lama hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Indeks ini dihitung dengan angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.
  7. ***Gender-related Development Indeks*/Indeks Pembangunan Gender** adalah suatu cara mengukur pencapaian dari dimensi dan indikator yang sama dengan IPM tetapi dengan memperhitungkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

1. **Ruang Lingkup P2WKSS**
   1. Sasaran Program Terpadu P2WKSS adalah perempuan dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dan/atau yang masuk dalam katagori keluarga miskin, keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I, dan menurut hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS).
   2. Jangkauan Program Terpadu P2WKSS meliputi semua desa/kelurahan dengan prioritas rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
   3. Desa/kelurahan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan atau Walikota setempat, berdasarkan atas asas kemandirian dan keswadayaan.
2. **Dasar Hukum Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung**
   1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 147/KEP. 842 BANSOS/2016 tentang penetapan lokasi Desa/Kelurahan Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2016.
   2. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 476/KEP.659- BPPKB 2016 tentang penetapan Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung sebagai Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2016.
   3. Keputusan Camat Andir Nomor : 400/KEP.67- Kec.Andir /2016 tentang Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2016.
   4. Keputusan Lurah Maleber Nomor : 400/Kep.16-Kel.Maleber/2016 tentang Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Tingkat Kelurahan Maleber Kota Bandung Tahun 2016.
3. **Dasar Hukum Desa Tanjungwangi Kabupaten Bandung Barat**
   1. Keputusan Bupati Nomor : 188.45/KEP.206-BP3AKB/2016 penetapan lokasi Desa-desa binaan untuk Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2016.
   2. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 800/KEP.59-BP3AKB/2014 tentang pembentukan Tim Pembina Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016.
   3. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 800/KEP. 60- BP3AKB/2014 tentang pembentukan Tim Verifikasi lokasi kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di lingkungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015.
   4. Keputusan Camat Cihampelas Nomor : 11/KEP.Kec/2016 tentang pembentukan Tim Pokja (kelompok kerja) Kecamatan Cihampelas pada Program Terpadu Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di lingkungan Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015.
   5. Keputusan Kepala Desa Tanjungwangi Nomor : 474.1/30/68/KEP.Desa/2015 tentang pembentukan Tim Pokja (kelompok kerja) RW 09 pada Program Terpadu Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di lingkungan Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015.
4. **Tujuan P2WKSS**
   1. **Tujuan Umum**

Tujuan Umum Program Terpadu P2WKSS adalah meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas.

* 1. **Tujuan Khusus**
     1. Meningkatkan status kesehatan perempuan
     2. Meningkatkan status pendidikan perempuan
     3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif
     4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup
     5. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat
     6. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pemahaman wawasan kebangsaan.

1. **Kebijakan P2WKSS**

Kebijakan program terpadu P2WKSS dilaksanakan dengan acuan sebagai berikut :

1. P2WKSS dilaksanakan melalui pendekatan lintas bidang pembangunan yang terkait dan lintas program secara terintegrasi di Tingkat Kota Bandung, Kecamatan dan Kelurahan
2. P2WKSS dilaksanakan dengan memanfaatkan petunjuk teknis yang relevan dengan tetap mempertimbangkan potensi dan karakteristik kondisi daerah.
3. P2WKSS dilaksanakan dengan menggunakan dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia baik dari pemerintah, dunia usaha, gerakan, LSM dan masyarakat.
4. **Strategi P2WKSS**

Operasionalisasi kebijakan Program Terpadu P2WKSS diprioritaskan pada Kelurahan rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan dengan cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen melalui perencanaan program dan anggaran sektor terkait, organisasi kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan masyarakat keseluruhan
2. Memantapkan keterpaduan dan koodinasi pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS dengan memanfaatkan berbagai forum dan pertemuan-pertemuan rutin maupun insidental dengan SKPD terkait
3. Memanfaatkan hasil pemetaan keluarga sejahtera pada daerah rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang dilakukan oleh SKPD lainnya
4. Memfasilitasi dan melakukan advokasi untuk membangun kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan program terpadu P2WKSS
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program terpadu P2WKSS untuk keberlanjutan program
6. **Pembiayaan dan Sarana**
   1. **Dana**

Program Terpadu P2WKSS dilaksanakan dan dikembangkan sebagai upaya bersama dengan semangat gotong royong, saling membantu dan penuh rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antara instansi pemerintah, Tim Penggerak PKK, organisasi masyarakat dan masyarakat sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sumber dan penyediaan biaya pelaksanaan program terpadu P2WKSS ini sebagai berikut:

1. Departemen/LPND pusat mendukung program dengan sumber biaya dari APBN sesuai dengan kegiatan dan tanggung jawab fungsional, mengalokasikan berbagai jenis kegiatan sebagaimana termuat pada Bab IV, dengan menggunakan dana yang tersedia dalam anggaran masing-masing instansi.
2. Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota sesuai kemampuan APBD masing-masing mengalokasikan biaya untuk berbagai jenis kegiatan program terpadu P2WKSS sesuai kebutuhan masing-masing.
3. Masyarakat di tingkat desa/kelurahan :

* Membiayai usaha gotong royong di tingkat desa/kelurahan P2WKSS dalam melaksanakan berbagai kegiatan program terpadu P2WKSS.
* Sumbangan sukarela yang terutama diarahkan untuk menambah pengadaan bahan-bahan yang diperlukan bagi berbagai kegiatan program terpadu P2WKSS.

1. Lembaga-lembaga donor luar negeri, serta organisasi kemasyarakatan yang bekerja sama dengan kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dapat membantu biaya penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan program terpadu P2WKSS sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku dan memiliki sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
   1. **Sarana**

Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan program terpadu P2WKSS antara lain berupa :

1. Buku Pedoman Umum pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
2. Pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh masing-masing Daerah
3. Petunjuk teknis pelaksanaan operasional yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang pembangunan yang dikeluarkan oleh departemen/instansi yang bersangkutan sesuai tugas fungsi masing-masing
4. Buku bacaan bagi peserta kursus/latihan keterampilan dan pemberantasan buta aksara serta penyuluhan yang diterbitkan oleh departemen/lembaga non departemen yang bersangkutan dalam rangka mendukung pelaksanaan program terpadu P2WKSS.